

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Teori

##### 2.1.1. Indikator-Indikator Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk secara umum dapat ditentukan berdasarkan tiga hal pokok yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Berdasarkan kualitas penduduk itulah, negara-negara di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu negara-negara maju (*developed countries*) dan negara-negara berkembang (*developing countries*). Pengelompokan negara berkembang dan negara maju, mengacu pada indikator sebagai berikut:

1. Pendapatan nasional per kapita:

$$Y_{cap} = \frac{GDP}{Jumlah\ Penduduk}$$

- a) Bila pendapatan nasional per kapita lebih dari US\$ 10.000, negara tersebut dikelompokkan sebagai negara maju.
- b) Bila pendapatan nasional per kapita kurang dari US\$ 10.000, negara tersebut dikelompokkan sebagai negara berkembang.

2. Struktur mata pencaharian penduduk:

Jika persentase tenaga kerja sebagian besar memproduksi bahan makanan pokok, negara tersebut termasuk negara berkembang.

3. Produktivitas per tenaga kerja :

Diperoleh dari seluruh produksi satu tahun dibagi dengan seluruh angkatan kerja. Semakin besar angka produktivitas per tenaga kerja, berarti suatu negara semakin maju.

4. Penggunaan energi per orang :

Semakin tinggi penggunaan energi negara tersebut tergolong negara maju.

5. Fasilitas transportasi dan komunikasi per orang :

Ditentukan dengan panjang jalan kereta api, jalan raya, frekuensi perhubungan udara, telepon, dan jumlah televisi. Makin tinggi indeksinya makin maju negara tersebut.

6. Penggunaan logam yang diolah :

Semakin banyak logam yang diolah semakin maju negara tersebut.

7. Ukuran lainnya :

Tingkat melek huruf penduduk, tingkat penggunaan kalori per orang, tingkat pendapatan keluarga dan jumlah tabungan per kapita.

### **2.1.2. Dana Desa**

Pada Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian menurut Peraturan diatas, pada Bab I Prioritas Penggunaan Dana Desa, dijelaskan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Dalam Buku Saku Dana Desa yang di rilis tahun 2017, mengusung tema *“Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat : Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan”* agar dijadikan pedoman bagi berbagai stakeholder dan perangkat yang terkait untuk mengetahui implementasi regulasi Dana Desa secara *consize* namun komprehensif, serta *“membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”*.

Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa perlu memperhatikan 6 prinsip dengan sebagai berikut:

1. Keadilan: Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

2. **Kebutuhan Prioritas:** Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. **Kewenangan Desa:** Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. **Partisipatif:** Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
5. **Swakelola dan berbasis sumber daya desa:** Pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. **Tipologi Desa:** Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

### **2.1.3. Kemiskinan**

Seringkali kemiskinan hanya diukur dari tingkat pendapatan saja, namun satu dimensi itu saja tidak cukup untuk mendefinisikan kemiskinan atau menggambarkan tingkat kemiskinan. *Multidimensional Poverty* menjadi gagasan baru untuk mengukur kemiskinan dari beberapa faktor yang diambil berdasarkan pengalaman penduduk miskin. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a) Kualitas kesehatan yang buruk,
- b) Rendahnya kesempatan bersekolah,
- c) Tidak tercukupinya standar kehidupan,

- d) Terbatasnya pendapatan,
- e) Ketidakmampuan atau ketidakberdayaan,
- f) Kualitas pekerjaan yang buruk,
- g) Dan ancaman kekerasan/kejahatan.

*The Multidimensional Poverty Index (MPI)* digagas oleh *Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHDI)* dan *The United Nations Development Programme (UNDP)*. MPI pertamakali muncul pada tahun 2010 pada edisi ulangtahun UNDP *Human Development Report 2010*, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran multidimensi dari penduduk yang hidup dalam kemiskinan. MPI menggunakan 10 indikator untuk mengukur tiga dimensi kemiskinan pada tingkat rumah tangga, yaitu : (1) pendidikan, (2) kesehatan, dan (3) standar kehidupan. MPI juga mengukur ketidakberdayaan dalam mengakses air bersih, sanitasi, dan listrik. Data-data yang meliputi MPI antara lain :

1. Kesehatan, meliputi :
  - a) Tingkat kematian bayi, jika dalam sebuah keluarga ada anak-anak yang meninggal.
  - b) Nutrisi, jika ada diantara orang dewasa atau anak-anak dalam sebuah keluarga mengalami malnutrisi.
2. Pendidikan, meliputi :
  - a) Lama Sekolah, jika ada anggota keluarga yang telah menyelesaikan sekolah sampai kelas 5.
  - b) *Child Enrolment*, jika ada anak usia sekolah yang keluar sekolah dalam usia 1 sampai dengan 8 tahun.

3. Standar kehidupan, meliputi :
  - a) Akses listrik,
  - b) Air minum,
  - c) Sanitasi dan MCK,
  - d) Lantai rumah,
  - e) Bahan bakar memasak,
  - f) dan asset (radio, televisi, alat komunikasi, dan kendaraan pribadi).

#### **2.1.1.1. Mengukur Tingkat Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

##### **1. Garis Kemiskinan**

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi

(padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

## 2. Persentase Penduduk Miskin

*Head Count Index* (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]$$

$\alpha$  = 0

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk

### 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]$$

$\alpha$  = 1

$z$  = garis kemiskinan

$y_i$  = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk

### 4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

$$P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]$$

$\alpha$  = 2

$z$  = garis kemiskinan



- $y_i$  = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$
- $q$  = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
- $n$  = jumlah penduduk

#### 2.1.4. PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per Kapita. Adapun dalam mengetahui jumlah PDRB per Kapita dapat menggunakan rumus berikut ini :

$$PDRB_{perKapita} (Rp/Kapita) = \frac{PDRB}{\Sigma penduduk}$$

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

#### 2.1.5. Sarana Prasarana, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial

Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang

sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah.

Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun tingkat daerah diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pertukaran informasi secara cepat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian dan mendukung daya saing secara global. Dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta perumahan dan pemukiman yang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Fasilitas Umum (fasum) adalah istilah umum yang merujuk pada sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dalam menggunakan fasilitas umum, masyarakat tidak dikenai biaya.

Berikut contoh fasilitas umum :

- a) Jalan raya,
- b) Tempat sampah,
- c) Tempat parkir khusus sepeda,

- d) Trotoar,
- e) Ruang terbuka hijau,
- f) Taman kota,
- g) Lampu penerangan jalan,
- h) Lampu lalu lintas,
- i) Papan penunjuk jalan,
- j) Hidran, dan
- k) Pelayanan pemadaman kebakaran.

Sedangkan Fasilitas Sosial (fasos) merupakan fasilitas yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman, contohnya seperti :

- a) Puskesmas,
- b) Klinik,
- c) Sekolah,
- d) Tempat ibadah,
- e) Pasar,
- f) Tempat rekreasi,
- g) Taman bermain,
- h) Tempat olahraga,
- i) Ruang serbaguna, dan
- j) Makam.

#### **2.1.6. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini maka selain dari kajian teori yang telah dijelaskan, dilakukan juga review terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini terutama didasarkan kesamaan objek penelitian yakni terkait dengan :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Variabel
1.	Silas Roberto, Muhtar Lutfi, Nurnaningsih	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara	Untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wuasa, realisasi ADD belum memnuhi target penggunaan yang ditentukan yaitu 30% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara realisasinya lebih besar untuk kegiatan pemerintahan dan BPD, dibandingkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (77,61% > 22,39%)	Penelitian ini menggunakan variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa yang indikatornya melihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan tujuan.
2.	Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, dan Venantya Asmandani (2018)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso.	Perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa yang terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk musrembang desa. Penggunaan keuangan desa secara umum 57% untuk pembangunan desa, 39% penyelenggaraan pemerintahan desa, 7% pemberdayaan masyarakat, dan 4% untuk pembinaan kemasyarakatan.	Menggunakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif, kedisiplinan administratif dan melihat efektivitas pengelolaan keuangan. Dan hasil umum keseluruhan desa-desa yang ada di Kabupaten Bondowoso.
3.	M. Rimawan, dan Fenny Aryani (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks	Mendukung dan mendampingi pembangunan dan pemberdayaan ekonomi melalui	Dengan pengujian <i>outer model</i> , menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi Dana	Penelitian ini juga melihat sejauh mana Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima.

No.	Nama	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Variabel
		Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima	dana desa.	Desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini menunjukkan bahwa desa sudah mampu menggunakan ADD secara efektif untuk mendukung pembangunan manusia dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa, lembaga pendidikan serta layanan kesehatan yang sudah ada di setiap desa.	
4.	Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V.J. Panelewen, dan Arie D.P. Mirah (2017)	Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Menganalisis kebijakan dana desa, khususnya pada proses penerapan dana desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya.	Program kegiatan yang bersumber dari dana desa telah diketahui setidaknya oleh responden sekitar 64,29%, dan sisanya tidak mengetahui akan ada program-program kegiatan yang bersumber dari dana desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan perekonomian serta pendapatan masyarakat.	Menggunakan beberapa data primer. Dari 14 desa, 7 desa digunakan sebagai sampel. 10 orang responden per desa yang diwawancarai.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

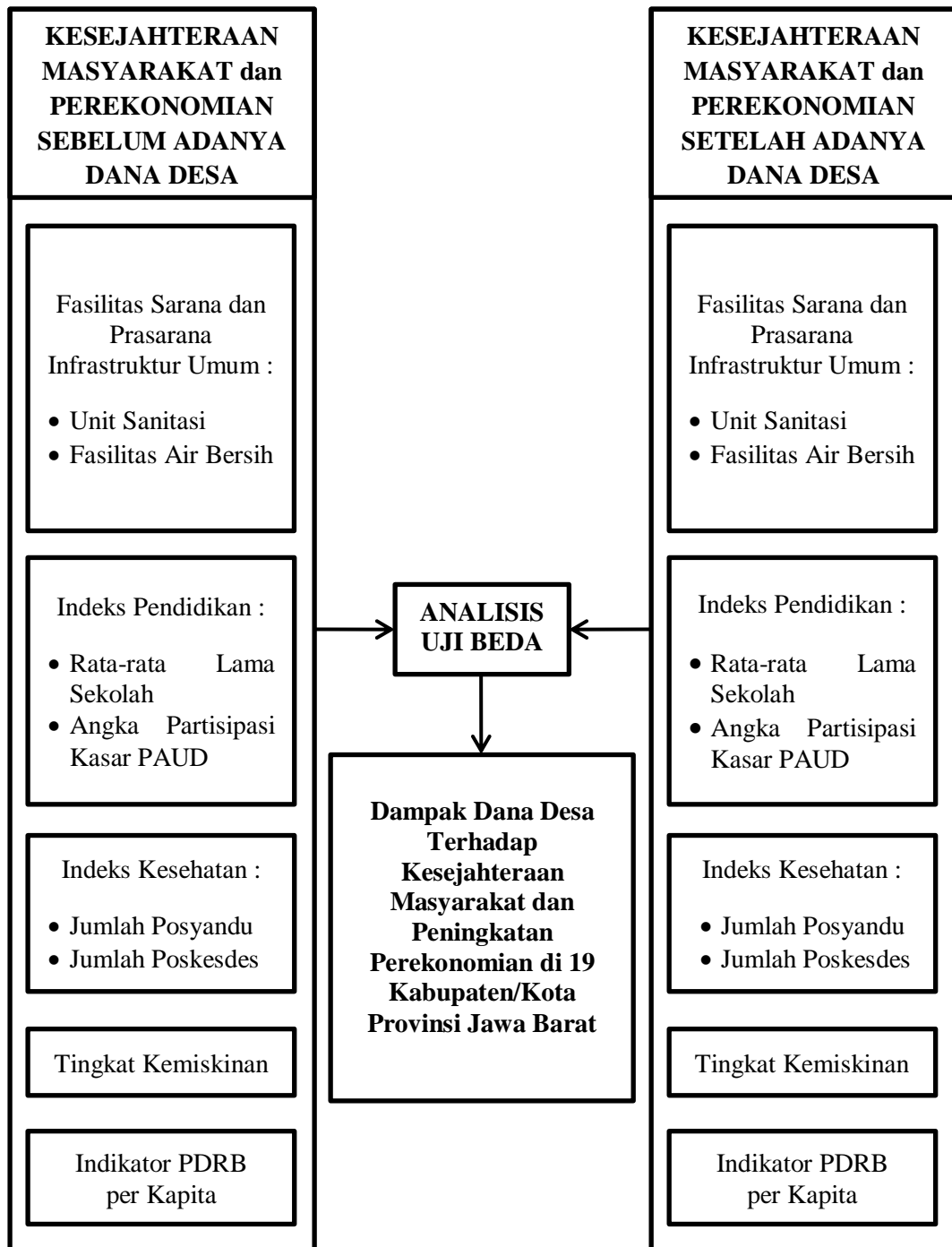
Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan biaya-biaya tersebut disalurkan dan agar dimusyawarahkan dalam internal desa. Dalam musyawarah tersebut disepakati Dana Desa dipergunakan untuk membiayai keberlangsungan kegiatan dan kemandirian desa melalui pembangunan dan pengelolaan dengan mekanisme partisipatif untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi daerah. Serta pelaksanaan-pelaksanaan dan pendampingan yang langsung diawasi oleh perangkat-perangkat terkait dan diharapkan terciptanya siklus ekonomi yang berkelanjutan, kreatif dan inovatif.

Semakin tinggi Dana Desa yang disediakan, semakin tinggi tingkat pembangunan desa. Peningkatan tingkat perkembangan ini dapat meningkatkan ekonomi kegiatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, semakin tinggi Dana Desa, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Prasetyo (2012) membuktikan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi regional dan mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan produk domestik bruto. Ashari (2013) membuktikan peran Dana Desa dalam pengembangan infrastruktur, ketika Dana Desa dialokasikan dengan benar, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak Dana Desa apakah berhasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Terdapat beberapa hasil yang diperoleh diantaranya meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur umum seperti jumlah sanitasi, dan air bersih. Meningkatnya indikator pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah, dan Angka Partisipasi Kasar PAUD. Meningkatnya indikator kesehatan seperti jumlah Posyandu, dan jumlah Poskesdes. Di samping itu juga dana desa bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang dapat dilihat dari peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat diukur dengan meningkatnya PDRB per Kapita.

Dengan adanya Dana Desa, memberikan dampak positif terhadap fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur umum, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah. Contohnya pada akhir tahun 2016 sebanyak 66.884 km jalan desa terbangun, 511,9 km jembatan, 1.819 unit pasar desa, 14.034 unit sumur, 686 unit embung, 65.998 drainase, 12.596 unit irigasi, 11.296 unit PAUD, 3.133 unit Polindes, 7.524 Posyandu, 38.184 unit penahan tanah, 1.373 unit tambatan perahu, 16.295 unit air bersih, dan 37.368 unit MCK. Melalui deduksi teori yang relevan serta induksi dari berbagai penelitian sejenis, secara garis besar kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat dituangkan dalam skema sebagai berikut.





Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

### **2.3. Hipotesis**

Hipotesis yang digunakan merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga program dana desa berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Diduga program dana desa berdampak pada peningkatan jumlah sarana prasarana infrastruktur dan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti jumlah sanitasi, dan ketersediaan air bersih di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Diduga program dana desa berdampak pada peningkatan kondisi pendidikan masyarakat dilihat dari indikator seperti rata-rata lama sekolah, dan Angka Partisipasi Kasar PAUD di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Diduga program dana desa berdampak pada peningkatan kondisi kesehatan masyarakat dengan indikator sarana kesehatan seperti jumlah Posyandu dan Poskesdes di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Diduga program dana desa berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian masyarakat dengan indikator PDRB per Kapita di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.